

MEMBINCANG BANYUWANGI SEBAGAI *THE DIGITAL SOCIETY*: Potensi Sastra Lokal dalam Arena Global¹

IRANA ASTUTININGSIH
Peneliti Matatimoer Institute
Pengajar Fak. Ilmu Budaya UNEJ
E-mail: iranainingsih@gmail.com

“Hati-hati dengan santet!” mungkin adalah satu dari sekian pernyataan yang kerap terucap terkait dengan Banyuwangi, kota yang terletak di wilayah paling timur pulau Jawa ini. Dengan kata lain, Banyuwangi kerap diidentikkan dengan praktik ilmu hitam dan dipersepsi sebagai kota yang saratkultur magis. Namun demikian, mengidentikkan Banyuwangi dengan kultur magis semata sama halnya dengan abai akan keragaman kultural tanah Using ini karena senyatanya, Banyuwangi pun cukup akrab dikenal sebagai kota dengan ragam kekayaan budayanya dari tari gandrung, musik kendang kempul, lagu berbahasa Using, wisata alam hingga kuliner. Mengidentikkan Banyuwangi dengan ilmu hitam semata tak ubahnya berjalan mundur dan menutup mata akan kekinian Banyuwangi dalam sejarah perkembangannya, karena senyatanya Banyuwangi bukanlah sebuah kota yang menutup diri terhadap laju jaman dengan segala kompleksitas kulturalnya. Ini artinya, membincang Banyuwangi dengan segala aspek kulturalnya adalah memosisikan kultur Banyuwangi sebagai yang dinamis, yang selalu bergerak aktif sebagai respon terhadap era global dan segala kekuatan dari luar yang memiliki potensi dominasi-hegemonik terhadap kultur lokal.

Dalam Setiawan disebutkan bahwa ekspresikultural Using yang masih populer dimasa kini merupakan hasil proses historis sejak era kolonial hingga hari ini yang diwarnai oleh praktik hibridisasi kultural sebagai strategi subjektivitas yang membentuk kebudayaan Using (2016). Dalam konteks yang lebih luas, perbincangan tentang budaya senyatanya bukanlah perbincangan tentang produk kultural yang stagnan atau yang dianggap sebagai artefak peninggalan jaman purba, namun berbicara tentang dinamika kultural dengan segala kompleksitas dan upaya-upaya strategis untuk *survive* di era global. Lebih jauh, berbicara tentang identitas masyarakat Using adalah membincang tentang identitas yang terus menerus dikonstruksi serta melintasi proses historis masa lalu dan masa kini, seperti yang dikatakan Hall tentang prinsip *becoming* dan *positioning* (2003).

Banyuwangi Sebagai Kota Digital

Pada 2013, Banyuwangi menyandang predikat sebagai kota digital pertama di Indonesia dengan diresmikannya program Bwi-DiSo (Banyuwangi Digital Society) pada 9 Maret 2013 oleh

¹ Makalah disampaikan dalam *Sekolah Kritik Budaya Angkatan II “Fokus Banyuwangi”* diselenggarakan oleh Matatimoer Institute di Sanggar “Angklung Soren”, Banjarsari, Banyuwangi, 14 – 15 April 2018.

Menkominfo Tifatul Sembiring.² Sebagai konsep kota dengan sistem layanan publik berbasis digital yang terintegrasi di berbagai bidang, Bwi-Diso diharapkan mampu memberi dampak praktis dan efisien dalam pengelolaan kota. Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Arief Yahya menyatakan saat ini Banyuwangi adalah kabupaten dengan jaringan wi-fidan ekosistem digital terlengkap dan terbesar di Indonesia sehingga dapat disejajarkan dengan kota-kota besar di belahan dunia. Sebagai awam yang abai dengan dinamika kultural dan terlanjur melekatkan Banyuwangi dengan kultur magis dan *ndeso*, bisa saja orang akan terperangah sekaligus takjub dengan sebutan Banyuwangi sebagai kota digital. Betapa tidak, teknologi digital sebagai produk modern dari barat menjadi lekat dengan Banyuwangi, kota di timur pulau Jawa yang dulunya jamak dipersepsi sebagai kota magis dengan ilmu hitamnya. Dalam salah satu kesempatan, wakil gubernur Jawa Timur berkomentar tentang Banyuwangi yang dulu dikenal sebagai kota santet namun kini lebih dikenal sebagai kota inovasi. Bahkan dalam kesempatan lainnya, ia mengatakan bahwa jika ingin melihat kerja nyata, datanglah ke Banyuwangi.

Predikat sebagai kota digital yang disematkan pada kota Banyuwangi ini memang tidak sekedar berhenti pada tataran wacana. Pihak pemerintah daerah Banyuwangi bergerak aktif di tataran implementatif dengan perbaikan sarana layanan publik berbasis digital; implementasi program Bwi-Diso Banyuwangi Digital Society ini membuahkan hasil beruntun. Dalam meliputi beberapa titik tekan: smart zakat, smart education, smart health, smart office, smart tourism dan *indipreneur*. Menarik untuk dicermati, program kurun waktu lima tahun, Banyuwangi mendapatkan 72 penghargaan nasional maupun internasional. Memang tidak bisa dikatakan bahwa penghargaan ini diperoleh semata-mata sejak dinobatkannya Banyuwangi sebagai kota digital pertama di Indonesia karena senyatanya penghargaan ini telah diterima sejak 2011 (sebelum peluncuran Bwi-Diso), namun peran media digital tak bisa dipungkiri sangat signifikan. Pada 31 Oktober 2017, Banyuwangi kembali mendapat penghargaan TOP IT dan Telco, yang merupakan penghargaan tertinggi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan *Itech Magazine* untuk yang dinilai berhasil dalam implementasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi. Bupati Anas menanggapi penghargaan tersebut sebagai bonus konsistensi dan komitmen Banyuwangi dalam menggunakan teknologi informasi sebagai kendaraan percepatan kemajuan daerah.

Terkait dengan digitalisasi Banyuwangi, hal yang jamak diperbincangkan dalam kerangka akademik maupun non akademik adalah peran internet dalam percepatan komunikasi dan informasi serta layanan publik untuk kemajuan daerah. Ini dapat dipahami mengingat studi tentang internet biasanya cenderung berkuat pada perspektif yang memosisikan internet sebagai media komunikasi dan perolehan informasi. Dalam konteks kajian budaya, senyatanya studi tentang internet meliputi beragam aspek yang lebih kompleks, mencakup berbagai persoalan yang saling terkait termasuk kapitalisme, konsumerisme dan komodifikasi, serta perbedaan kultural dan militerisasi dalam keseharian

²Informasi tentang program Bwi-Diso dan pencapaian prestasi setelahnya disarikan dari berbagai sumber di harian online

(Silver, 2006: 6). Diskusi tentang internet semestinya melampaui perspektif esensialis yang kerap menafikan pengguna sebagai subjek aktif yang terlibat dalam produksi teks dan simbol kultural, karena senyatanya, internet lebih dari sekedar media, namun juga sekaligus arena kontestasi kultural yang dalam istilah Fiske disebut sebagai medan perang semiotik (via Storey, 1996: 33).

Diskursus Banyuwangi sebagai kota digital yang umumnya dipersepsi sebagai keberhasilan pemerintah Banyuwangi dalam upaya percepatan kemajuan daerah ini menunjukkan betapa teknologi digital telah mempermudah dan mempercepat proses layanan publik. Dengan kurang lebih 1400 titik wi-fi yang dipasang di seantero Banyuwangi, layanan publik dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah. Teknologi digital dengan karakteristiknya yang memberi andil terhadap ‘budaya percepatan’ menunjukkan logika teknologi yang berimplikasi terhadap berkurangnya ‘upaya fisik’ manusia karena tergantikan oleh teknologi digital, yang disebut Virillio sebagai ‘least effort or least action’ (dalam Tomlison, 2007: 90). Seperti disinggung sebelumnya, titik tekan layanan digital mencakup enam bidang: agama, kesehatan, edukasi, birokrasi, wisata dan bisnis. Fitur ini dengan mudah diakses di website resmi pemerintah daerah Banyuwangi. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Banyuwangi tak henti menyerukan himbauan pada masyarakat untuk turut memanfaatkan teknologi digital ini. Di satu kesempatan pelatihan internet marketing misalnya, bupati Anas mendorong generasi muda untuk berbisnis via internet agar mereka dapat turut menciptakan lapangan kerja.

Menarik untuk dicermati bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian sangat besar di keenam bidang tersebut diatas. Dengan layanan berbasis teknologi digital, Banyuwangi yang sarat potensi kultural mendapat peluang emas untuk disejajarkan dengan kota-kota besar diberbagai belahan dunia. Pada tahun 2015 misalnya, tercatat Banyuwangi mendapat kunjungan sekitar 2 juta wisatawan nusantara dan 50 ribu wisatawan mancanegara. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dibandingkan Bali dan Sumatera Selatan dengan cakupan level propinsi yang ‘hanya dikunjungi’ 8 juta winus dan 30 ribu wisman masing-masing. Namun tulisan ini tidak akan menyoal angka-angka yang dinilai bombastis dan dirujuk sebagai tolok ukur keberhasilan Banyuwangi dengan program Bwi-DiSo nya. Dengan kata lain, karena berbicara dalam konteks kajian budaya yang beranjak melampaui pemikiran esensialis, angka-angka bombastis dan ‘percepatan layanan publik melalui digitalisasi’ tersebut tidak dijadikan rujukan tunggal. Lebih jauh, ada persoalan yang lebih penting dan kompleks untuk dipikirkan. Ketika digitalisasi dipersepsi sebagai produk teknologi yang berimplikasi kompleks terhadap keseharian seperti disebut Silver (2006), maka pertanyaan yang muncul adalah: apakah Banyuwangi dengan program Digital Society nya benar-benar mampu berkontestasi kultural secara menyeluruh di segala bidang? Jika teknologi digital sebagai bagian dari era global menawarkan kemudahan dan percepatan akses di segala bidang, apakah nilai-nilai filosofis dalam budaya lokal Banyuwangi mendapatkan ruang yang leluasa untuk hadir dan menegosiasi kelokalannya sebagai *strategy of survival* di era global? Bagaimana pula halnya dengan sastra Banyuwangi dengan potensi yang semestinya tak dapat

dinafikan begitu saja? Pertanyaan ini muncul mengingat sastra Banyuwangi yang tidak muncul dalam keenam titik tekan program Bwi-Diso tersebut.

Saya tidak mengatakan bahwa perhatian pemerintah pada keenam titik tekan tersebut adalah sebuah kesalahan mutlak. Digitalisasi di bidang wisata, bisnis, birokrasi, agama dan pendidikan bukan pula sebuah dosa. Pemerintah juga tidak dapat dikatakan sama sekali abai terhadap perkembangan sastra Banyuwangi. Di satu perhelatan sastra semisal festival sastra dan kemah sastra yang digelar tahun 2017 dan 2018 misalnya, pemerintah cukup memberi dukungan. Namun bagaimanapun juga, fasilitas dan akses digital terhadap kesastraan Banyuwangi luput dari perhatian dalam konteks program Bwi-Diso. Identitas Banyuwangi sebagai digital society nampaknya lebih mengarah pada persoalan melek teknologi dan percepatan layanan publik serta mendorong gerak aktif dalam bisnis dan wirausaha, yang pada akhirnya akan bermuara pada perayaan kapitalisme global. Padahal pada kenyataannya, lokalitas yang hadir dalam sastra Banyuwangi merupakan potensi yang luar biasa atau dapat dikatakan sebagai modal kultural untuk turut berkontestasi di arena global yang diwakili oleh teknologi digital. Ini penting untuk dibicarakan mengingat teknologi digital tidak dapat dipandang netral atau 'innocent' namun turut berkontribusi terhadap pergeseran pola kapitalisme global (Tomlison, 2007: 120).

Geliat Sastra Banyuwangi dan Wacana Lokalitas

Jejak perkembangan sastra Banyuwangi bisa ditelusuri sejak era 1960-an.³ Kontribusi sastrawan Lekra seperti Andang CY terhadap perkembangan sastra Banyuwangi terlihat dalam karya karyanya yang dikirim ke majalah lokal maupun nasional. Cukup banyak penyair yang turut merintis pertumbuhan sastra di Banyuwangi semisal Armaya, Hasnan Singodimayan, Pomo Martadi, Yoko S. Pasandaran, Slamet Utomo, dan Cipto Abadi. Sejak era RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah) tahun 70-an, terdapat perkembangan yang menarik karena RKPD Banyuwangi menjadi situs yang menyuburkan dunia sastra, baik yang berbahasa Indonesia maupun Using. Atmosfir kesastraan terbangun cukup bagus karena di acara pembacaan dan apresiasi sastra di RKPD berlangsung diskusi dan kritik terhadap puisi-puisi yang dibacakan.

Di awal tahun 80-an, di Banyuwangi mulai muncul penyair-penyair yang mempublikasikan karya melalui program radio maupun di media massa, baik lokal maupun nasional, seperti Bali Post dan *Horison*. Di antaranya adalah Fatah Yasin Noor, Agus Aminanto, Gimin Artekjursi, Syamsul Hadi ME., dan Suhaili Bachtiar. Program radio yang memberi ruang sastra bukan lagi hanya di RKPD, tetapi juga radio swasta *Mandala AM Stereo*, dengan program *Ladang Sastra*.

Geliat Sastra Banyuwangi di periode 1990-an makin ramai dengan bermunculannya penyair muda berbakat. RKPD dan Mandala masih menyiarkan program sastra-nya masing-masing. Para penyair pada periode ini antara lain: Irwan Sutandi, M. Karyono, Adji Darmaji,

³ Elaborasi tentang perkembangan sastra Banyuwangi disarikan dari tulisan Fatah Yasin Noor. 2010. "Perjalanan Sastra Banyuwangi", diunduh dari: <http://sastra-indonesia.com/2010/09/perjalanan-sastra-di-banyuwangi/>, 26 Juni 2014.

Un Hariyati, Rosdi Bahtiar Martadi, Sentot Parijatah, Abdullah Fauzi, Iwan Aziez Syswanto S., A. Ardiyan, Taufik Walhidayat, Dwi Pranoto, Tri Irianto, M. Solichin, Samsudin Adlawi, Iqbal Baraas, dan Yudi Prasetyo. Mereka menerbitkan antologi puisi, buletin, dan majalah sastra. Karena minimnya dana dan keterbatasan teknologi cetak, mereka menerbitkan antologinya dengan diketik secara manual lalu digandakan kemudian dibagi-bagikan. Puisi-puisi Sentot Parijatah, kerap dimuat di *Surabaya Post* di tahun 1996. Puisi-puisi Samsudin Adlawi dimuat di *Jawa Pos*. Salah satu hal yang cukup menggembirakan dalam ramainya kegiatan sastra di Banyuwangi adalah penerbitan media sastra seperti *Jurnal Lontar* (1971, diasuh oleh Pomo Martadi), *Buletin Point* (1980), *Buletin Imbas* (1990, dipimpin Tri Irianto), *Buletin Menara Baiturrahman* (1990, Pimred Fatah Yasin Noor), *Buletin Jejak*, yang kemudian bermetamorfosis menjadi *Majalah Budaya Jejak* (dari tahun 1990 sampai sekarang, diasuh oleh Armaya dan Pimred Fatah Yasin Noor kemudian Iwan Aziez Siswanto S.), *Majalah Seblang* (berbahasa daerah Using), dan *Buletin Baiturrahman* (2000, Pimred Abdullah Fauzi, Fatah Yasin Noor, Iwan Aziez Syswanto S.), *Lepasparagraph* (2002, dikelola oleh Taufiq Wr. Hidayat dan Dwi Pranoto).

Selain penerbitan jurnal dan majalah, beberapa sastrawan juga menerbitkan antologi puisi. Penerbitan tersebut digawangi oleh komunitas sastra yang hidup dan berkembang di Banyuwangi. Salah satu komunitas yang masih bertahan hingga saat ini adalah *Komunitas SELASA* (Senantiasa Lestarikan Sastra) yang digawangi oleh beberapa penyair muda, seperti Samsudin Adlawi, Fatah Yasin, Ardiyan, dan yang lain. Komunitas ini mengadakan pertemuan rutin setiap hari Selasa. Beberapa antologi yang pernah diterbitkan adalah *Cadik* (Komunitas Selasa dan Komunitas Penyair Bali, 1998), *Menara Tujuh Belas* (Pusat Studi Budaya Banyuwangi, 2002), *Dzikir Muharam* (Yayasan Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, 2004), *Tilawah* (Yayasan Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, 2005). Selain komunitas ini, Yayasan Masjid Agung Baiturrahman juga memiliki agenda rutin untuk menerbitkan karya para penyair secara tunggal, antara lain: *Suluk Rindu* (Taufiq Wr. Hidayat, 2004), *Dzikir Debu* (Nuchbah Baroroh, 2005), *Tasbih* (Abdullah Fauzi, 2006).

Berbicara tentang wacana lokal, secara garis besar tema lokalitas yang dihadirkan dalam karya sastra global meliputi (1) persoalan kehidupan religi dan budaya lokal; (2) eksotisme budaya maupun bentang alam yang menawarkan ekstase di tengah-tengah modernitas serta isu-isu ekologis; (3) persoalan politik pascakemerdekaan dan kritik terhadap tanah air; (4) persoalan jender dalam masyarakat lokal dan pengaruh diskursif pemikiran jender dari Barat; dan, (5) hibriditas kultural yang berlangsung dalam masyarakat lokal sebagai akibat kuatnya pengaruh modernitas dan masih adanya keinginan untuk menegosiasikan budaya tradisional. Terkait dengan lokalitas dalam sastra Banyuwangi, Dwi Pranoto dalam antologi puisinya yang berjudul *Hantu, Api, Butiran Abu* (2011) bercerita tentang lokalitas—legenda, kesenian, dan permasalahannya. Yang menarik disini adalah dia mencoba menyandingkannya dengan mitos-mitos dari dunia luar-Barat. Sastrawan lain yang menampilkan kesadaran melokal sekaligus mengglobal adalah Halim Bahriz, yang dalam puisinya *Ritual Penghapus Ingatan* yang menghadirkan kembali kisah legenda Sritanjung dan Sidopekso sebagai bentuk pemanggilan

ulang penamaan jalan dan anak-anak yang baru lahir. Dalam tataran substantif, puisi ini menghadirkan eksplorasi kultur Banyuwangi yang terjebak pada persolekan masal; berkuat pada pembangunan fisik dan mengabaikan mental (Pujiati, 2016: 64-69).

Uraian atas menunjukkan bahwa potensi kesastraan Banyuwangi dengan nilai lokalnya merupakan modal kultural yang tak dapat dipandang sebelah mata dan sangat layak dipertimbangkan dalam konteks kebijakan pemerintah daerah terkait program Bwi-DiSo. Jika masyarakat Banyuwangi dengan predikat *the digital society* nya diharapkan melek teknologi, maka sangat layak jika ke-melek teknologi-an ini dibarengi dengan ke-melek sastra-an, sehingga nilai lokal yang mewujud dalam karya sastra benar-benar mendapat ruang untuk menegosiasi kelokalannya di era global. Jika internet jamak dipersepsi sebagai media percepatan layanan publik untuk kemajuan Banyuwangi, sangat mungkin internet juga diposisikan sebagai arena global tempat teks-teks dan simbol-simbol kultural diproduksi secara kreatif melalui karya sastra masyarakat tanah Using ini.

Sastra Internet dan Negosiasi Identitas Lokal Banyuwangi

Sastra internet, atau dalam istilah lain kerap disebut *sastra cyber*, berawal dari konsep sastra digital; yakni segala bentuk kesastraan yang diciptakan dan difasilitasi oleh media komputer. Sastra cyber dapat dipakai sebagai istilah payung yang meliputi: 1) semua teks yang terdapat di internet termasuk prosa maupun puisi yang dijumpai di *homepage* para penulis profesional, kumpulan teks sastra klasik di web-web khusus, maupun majalah online; 2) teks kesastraan yang ditulis penulis nonprofessional yang tersebar di penjuru ruang virtual. Teks kesastraan ini memungkinkan satu bentuk analisis yang berbeda daripada analisis teks sastra tradisional. Teks ini meliputi pula *fanfiction*⁴ (fiksi penggemar), berbagai tulisan harian di blog-blog sehingga internet disini berfungsi sebagai wadah publikasi yang bersifat independen; 3) Sastra hypertext dan cybertext: yaitu teks kesastraan dengan struktur yang lebih kompleks dengan melibatkan visualisasi serta teks multimedia (Viires: 2005). Saat ini juga marak dijumpai karya fiksi yang diunggah oleh penulis non profesional di aplikasi-aplikasi khusus, semisal watpadd. Diantara tiga cakupan definisi istilah sastra cyber seperti disebutkan diatas, definisi yang kedualah yang dijadikan rujukan dalam konteks ini.

Apa yang diprediksi Umar Kayam (dalam Brahmento, 1986: 24) tentang 'corak lain' sastra Indonesia pasca 2000 yang mungkin merupa sebagai sastra komputer senyatanya kini makin marak dijumpai di ruang cyber. 'Corak lain' yang dikatakannya merupakan keunikan tersendiri yang membedakan sastra cyber dengan sastra non- cyber. Salah satu keunikan dari sastra cyber adalah sifatnya yang anonim sesuai dengan karakteristik kultur cyber, yang terlihat jelas pada fenomena maraknya *anonymous writer* di berbagai situs fiksi. Hal unik lainnya adalah sifatnya yang 'interaktif'. Ruang cyber memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara penulis dan pembaca. Bahkan dalam konteks sastra penggemar, dapat

⁴ Fan fiction adalah sebuah karya fiksi yang ditulis oleh penggemar satu teks sumber tertentu. Sebagai karya penggemar, fan fiction meminjam karakter atau setting dari satu teks sumber yang dapat berwujud novel, film, serial televisi, grup musik, atau tookhriil.

dikatakan bahwa 'struktur hirarkis' antara penulis dan pembaca telah mengabur, jika tidak dapat dikatakan sepenuhnya 'hilang'. Pembaca dapat memberi komentar atau kritik secara langsung terkait dengan karya yang telah diunggah oleh penulis. Lebih jauh, pembaca juga dapat ikut andil dalam proses penulisan fiksi sekaligus mengubah alur cerita, karakter, setting dan elemen-elemen lainnya. Ini terjadi karena karya fiksi penggemar yang diunggah di sebuah weblog atau situs khusus acapkali merupakan suatu karya yang belum selesai, dan biasanya disebut sebagai *work in progress* (Hellekson, 2006). Ini menunjukkan bahwa relasi yang terbangun antara penulis dan pembaca bersifat sangat demokratis dan egaliter, meskipun pada akhirnya penulis tetap memiliki kuasa penuh atas fiksi yang diunggahnya. Relasi unik yang demokratis antara penulis dan pembaca fiksi cyber ini jelas tidak bisa dipisahkan dari karakteristik media internet yang memungkinkan siapapun untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses kreatif seperti apa yang disebut oleh Fiske sebagai 'demokrasi semiotik', yaitu suatu kekuatan media dalam memungkinkan audiens untuk ikut terlibat dalam proses kreatif terhadap pembentukan simbol-simbol kultural, bukannya sebagai pihak konsumen yang pasif (Fiske, 1997).

Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam konteks kajian budaya yang melampaui perspektif esensialis, internet diposisikan lebih dari sekedar media perolehan informasi dan percepatan komunikasi. Istilah *cyberspace* dikatakan oleh David Bell sebagai yang 'eksis' bukan dalam sekedar dalam konteks software maupun hardware namun dalam konteks *story-telling* (2007: 7). Ini berbeda dengan yang dikatakan Benedikt yang mendefinisikan ruang cyber sebagai ruang yang 'non-eksis' (2000). Lebih jauh, Bell menyebut istilah 'cyberculture' yang dianggapnya bersinonim dengan 'cyberspace'. Dalam pemahaman awam keduanya mungkin dimaknai secara berbeda. Jika 'cyberspace' dipahami sebagai ruang yang mewadahi aktivitas-aktivitas kultural, maka 'cyberculture' dipahami sebagai kultur yang terjadi didalamnya. Namun Bell menolak dengan tegas pemisahan dikotomis yang *rigid* antara keduanya, karena *cyberspace* tak dapat dipisahkan dari konteks kulturalnya, dan karena teknologipun pada dasarnya adalah hal yang kultural (2001: 8). Uraian ini menunjukkan bahwa posisi internet dalam proses konstruksi dan produksi teks kultural merupakan hal yang tak dapat dipungkiri. Pada konteks digitalisasi masyarakat Banyuwangi, jika media digital ini dipandang sebagai arena global tempat berlangsungnya kontestasi kultural, maka proses negosiasi identitas lokal tanah Using akan berlangsung tak terkecuali melalui sastra.

Menyoal identitas dan proses negosiasi di arena global, saya mengapresiasi pemikiran Homi K. Bhabha sebagai salah satu penggagas teori pascakolonial. Jika Said bertitik tekan terhadap diskursus oposisi biner antara barat dan timur yang meletakkan Barat sebagai superior dengan stereotyping dan hegemoninya terhadap timur, maka Bhabha menyoal persoalan poskolonial dengan lebih kompleks. Menurutnya, resistensi terhadap poskolonialisme tidak harus dipahami sebagai tindak oposisional atau penolakan total, namun selalu bersifat ambigu dan tidak utuh atau terpecah. Kondisi terpecah ini menjadikan subjek berada pada *liminal space between culture*. Antara kultur *the colonizer* dan *the colonized* terdapat ruang antara yang memungkinkan keduanya saling berinteraksi dalam posisi

interdependent. Keberantaraan sekaligus resistensi yang ambigu inilah yang mendorong munculnya hibriditas (1994: 1-5).

Posisi keberantaraan subjek poskolonial dalam pandangan Bhabha sangat sejalan dengan sifat liminal ruang cyber yang memungkinkan hibriditas berlangsung. Dalam konteks ini, persoalan identitas pun muncul bukan sebagai sesuatu yang terberi, namun satu hasil konstruksi yang bersifat kompleks. Maka ketika sastra cyber melampaui batas-batas konvensional sastra non cyber, identitas kultural pun menjadi makin goyah dan rentan terhadap segala perubahan yang berakar dari persoalan dominasi, hegemoni maupun resistensi. Persoalan identitas selalu merupakan proses yang tak kunjung selesai, sebagaimana dikatakan Hall bahwa identitas bukan sesuatu yang mapan secara esensial, yang tidak berubah dan terlepas dari konteks historis dan kultural (1993: 227). Dalam perspektif poskolonial, goyahnya identitas yang diwakili oleh sastra cyber ini dapat mewujudkan dalam dua konteks; narasi teks, dan kultur subjek poskolonial sebagai penulis maupun pembaca. Dalam konteks masyarakat Banyuwangi, kultur timur tanah Using ini mendapat tempat cukup leluasa untuk menegosiasi kelokalannya dalam sebuah arena global yang notabene merupakan produk teknologi Barat. Lebih jauh, nilai-nilai lokal yang diwakili subjek poskolonial mewujudkan dalam liminalitas kultur cyber dan menegosiasi kelokalannya tanpa harus menampakkan penolakan total terhadap kultur barat. Dengan kata lain, ada relasi dinamis yang terjalin antara teknologi barat dan lokalitas timur yang kerap disebut sebagai glocalisasi. Sebagaimana disinggung Setiawan, glocalisasi ini menunjukkan kultur lokal dapat menunjukkan resistensi sekaligus adaptasinya terhadap fenomena global (2009).

Sebagaimana disinggung sebelumnya, membincang tentang budaya bukan berarti membicarakan sesuatu yang *out-of date* dan mapan, namun menyoal dinamika kultural yang kompleks, yang bergerak melintasi ruang dan waktu. Bersandar pada konsep bahwasemuaproses kultural adalah konstruksi yang dilakukan secara ajeg dengan prinsip *becoming* dan *positioning* serta melintasi proses historis masa lalu dan masa kini (Hall, 2003), identitas masyarakat Banyuwangi sebagai *digital society* pun merupakan bagian dari proses *becoming* dan *positioning*. Artinya, Banyuwangi telah, tengah dan masih akan terus berproses dalam segala kompleksitas identitas kulturalnya. Dengan modal kesastraan yang tidak dapat dipandang sebelah mata, masyarakat Banyuwangi memiliki akses yang cukup leluasa untuk menegosiasi kelokalannya melalui karya sastra. Dalam berbagai situs dan aplikasi fiksi non profesional, telah cukup banyak dijumpai penulis muda dari Banyuwangi yang turut aktif dalam produksi teks kultural melalui karya-karya mereka. Namun sejauh ini, kreativitas mereka masih belum terlihat menyoal lokalitas sebagai pencirinya. Karya-karya fiksi yang dihadirkan dalam aplikasi maupun situs di internet belum terlihat sebagai upaya negosiasi kelokalan identitas masyarakat Using sebagai *survival strategy* di era global. Ini cukup disayangkan, mengingat mereka adalah bagian dari *the digital society*, dengan asumsi memiliki akses sangat mudah ke media. Dengan kata lain, kesadaran melokal sekaligus mengglobal melalui arena kontestasi kultural ini belum tampak secara signifikan. Di sinilah perlunya peran aktif dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah Banyuwangi untuk

bergerak dalam tataran implementatif, sehingga *the digital society* tidak sekedar berkuat pada persoalan percepatan kemajuan daerah yang diukur dari angka-angka fantastis semata, namun juga pada kesadaran akan nilai lokal yang terus menerus dinegosiasi sebagai strategi untuk *survive* di era global.

Tantangan ke Depan

Ketika media internet sekedar diposisikan sebagai sarana percepatan informasi dan komunikasi, *the digital society* akan sekedar menjadi selebrasi- selebrasi kultural yang bermuara pada kapitalisme global, terlebih ketika nilai filosofis kultur lokal tidak mendapat ruang. Di era digital, sastra senyatanya memiliki peluang cukup besar dalam kontestasi kulutral di arena global dengan menegosiasi kelokalannya. Nilai-nilai filosofis budaya lokal masyarakat Using melalui karya sastra mendapat tantangan di era digital untuk terus menegosiasi kelokalannya sebagai *survival strategy* di era global.

Referensi

- Bell, David. 2001. *An Introduction to Cyberculture*. London: Routledge.
- Bell, David. 2007. *Cyberculture Theorists*. USA: Routledge.
- Benedikt, Michael. "Cyberspace: First Steps" dalam David Bell & Barbara M. Kennedy (eds). 2000. *The Cybercultures Reader*. New York: Routledge.
- Bhabha, Hommi K. 1994. *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Brahmanto, B. 1986. "SastraKomputer" dalam Basis, Januari 1986. Yogyakarta: Yayasan Basis.
- Hall, Stuart. 2003. "Introduction: Who Need „Identity“?". Dalam Stuart Hall & Paul du Gay (ed). *Questions of Cultural Identity*. London: Sage Publications.
- Hellekson, Karen and Kristina Busse. 2006. *Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet*. London: McFarland & Company.
- Pujiati, Hat & Irana Astutiningsih. 2016. *Spiritualitas Sebagai Localpoetic dari Komunitas Sastra di Daerah Tapal Kuda*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Setiawan, Ikwan. "Contesting the Global: Global culture, hybridity, and strategic contestation of local-traditional cultures" in *Jurnal Sosial dan Budaya Bulak*, Vol 4, Mei 2009. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Setiawan, Ikwan. 2016. "Bukan sekedar mencampur budaya: Hibriditas sebagai politik kultural masyarakat Using dan titik baliknya di masa kini". Disampaikan dalam *Temu Ilmiah Nasional "Jejak dan Langka Bahasa, Sastra, dan Budaya: dari Using untuk Indonesia,"* Rektorat Universitas Jember 9 Agustus 2016.
- Silver, David & Adrienne Massanari. 2006. *Critical Cyberculture Studies*. New York: New York University.
- Storey, John. 1996. *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Tomlinson, John. 2007. *The Culture of Speed*. London: Sage Publication.
- Virees, Piret. 2005. *Literature in Cyberspace*.
<http://www.folklore.ee/folklore/vol29/cyberlit.pdf> (diakses November 2012).